



LAPORAN KINERJA (LKJ)

T
A
2
0
1
7

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) adalah perwujudan pertanggung jawaban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pencapaian LKj dimaksud memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/99 Tahun 2003 tanggal 12 Maret 2003, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan setiap akhir Tahun Anggaran seluruh Lembaga/ Instansi Pemerintah diharuskan membuat Laporan Kinerja (LKj).

Adapun maksud dan tujuan dari pada Laporan Kinerja adalah untuk memperoleh/ terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan tentu dibutuhkan adanya dukungan kerjasama dari semua pihak baik Instansi Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

LKj Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dibuat sesuai fakta dan kenyataan di lapangan, sekaligus merupakan suatu pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian kinerja.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, semoga kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Tahun 2017 dapat terus ditingkatkan pada tahun berikutnya. Semoga LKj ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan Permukiman.

Gunungsitoli, 25 Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI,



WIRNI ZEBUA, ST, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19650524 199703 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	(i
DAFTAR ISI	(iii
BAB I PENDAHULUAN	(1
A. KEDUDUKAN	(1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	(2
C. STRUKTUR ORGANISASI	(3
D. KENDALA/PERMASALAHAN.....	(20
E. PEMECAHAN MASALAH	(21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	(22
A. VISI DAN MISI	(22
B. TUJUAN DAN SASARAN	(23
C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM	(24
D. PERJANJIAN KINERJA	(25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	(26
A. CAPAIAN KINERJA UTAMA	(26
C. REALISASI ANGGARAN	(36
BAB IV PENUTUP	(42



A. KEDUDUKAN

Kota Gunungsitoli adalah kota yang terletak sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak antara 00°12'-01°32' Lintang Utara (LU) dan 97°00'-98°00' Bujur Timur (BT). Dengan ketinggian rata-rata 0 - 600 meter diatas permukaan laut. Kota Gunungsitoli juga adalah salah satu daerah kota di Propinsi Sumatera Utara yang mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga. Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah mencapai ± 469,36 Km², atau mencapai 0,63 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu daerah kota dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi alam/topografi daratan Pulau Nias sebagian besar berbukit-bukit sempit dan terjal dengan tinggi di atas permukaan laut bervariasi antara 0 – 800 m.

Terbentuknya Kota Gunungsitoli merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias yang berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008, yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunungsitoli Utara (79,73 Km²), Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (60,21 Km²), Kecamatan Gunungsitoli (109,09 Km²), Kecamatan Gunungsitoli Selatan (56,85 Km²), Kecamatan Gunungsitoli Barat (28,70 Km²), dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (134,78 Km²). Masing-masing kecamatan terdiri atas desa/kelurahan. Jumlah total desa/kelurahan di Kota Gunungsitoli adalah sebanyak 101 desa/ kelurahan dengan jumlah desa sebanyak 98 desa dan kelurahan sebanyak 3. Secara administratif Kota Gunungsitoli berbatasan dengan :

- ✿ Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias Utara pada wilayah Kecamatan Sitolu Öri (Kab. Nias Utara)
- ✿ Sebelah Timur : berbatasan dengan Samudera Hindia.

- ⊕ Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias pada wilayah Kecamatan Gidö dan Kecamatan Hiliserangkai (Kabupaten Nias).
- ⊕ Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias di Kecamatan Hiliduho (Kab. Nias) serta wilayah Kecamatan Alasa Talumuzöi dan Kecamatan Namöhalu Esiwa (Kab. Nias Utara).

Melalui pendekatan perencanaan teknis dengan memperhatikan rencana tata ruang diharapkan pembangunan sektor permukiman dan prasarana wilayah kota dapat memiliki kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari, yang akhirnya bermuara pada usaha percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Gunungsitoli.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau disingkat Dinas PERKIM Kota Gunungsitoli, adalah merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang membidangi kegiatan Teknik yaitu Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah :

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kota dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pemerintah kota di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor : 47 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi antara lain :
 - a. perumusan kebijakan di bidang permukiman rakyat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang permukiman rakyat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman rakyat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :
 - a. mengkaji dan merumuskan perencanaan program dan kegiatan permukiman rakyat ;
 - b. mengkaji dan merumuskan program dan kegiatan di bidang permukiman rakyat;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standar pelayanan minimal di bidang permukiman rakyat;
 - d. mengkaji dan merumuskan pelaksanaan penataan, pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum dan bangunan gedung dan permukiman rakyat;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penataan, pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum, bangunan gedung, dan permukiman rakyat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan penataan, pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan permukiman rakyat;
- h. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pada Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dan Bidang Kawasan Permukiman;
- i. memvalidasi dan melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, dan bidang kawasan permukiman dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. mempromosikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah Kota Gunungsitoli di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- l. memimpin pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Gunungsitoli;
- m. memimpin rapat/pertemuan yang berhubungan dengan bidang tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, terutama bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- n. mengkoordinasikan tugas-tugas pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah yang lebih tinggi menurut ketentuan yang berlaku;
- o. menetapkan penyusunan dan sasaran program kerja dinas serta mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah;
- r. memimpin, mengkoordinasikan penyusunan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan tugas kedinasan secara operasional maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- u. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- v. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- x. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS

- (1) Sekretaris Dinas melaksanakan tugas perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi antara lain :
 - a. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan di bidang kesekretariatan dinas;

- b. penyelenggaraan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan dan penyusunan pelaporan;
- e. penyelenggaraan verifikasi pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyelenggaraan verifikasi penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. penyelenggaraantugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sekretaris Dinas yaitu :

- a. menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan dinas;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan dinas;
- c. mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan, kebendaharawan, verifikasi, akuntansi, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum meliputi organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kepastakaan, kehumasan di lingkungan dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi aset meliputi perlengkapan perkantoran, rumah tangga, pengurusan barang/aset;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
- h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
- j. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi;

- k. menyelenggarakan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sesuai tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan;
- m. menyelenggarakan penetapan indikator kinerja kegiatan;
- n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- o. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan membawahi :

A. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, data, dan informasi publik.
- (2) Rincian Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan sub bagian bagian perencanaan, data dan informasi publik;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan sub bagian bagian bagian perencanaan, data dan informasi publik;

- c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sub bagian perencanaan, data dan informasi publik;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj);
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan standar pelayanan minimal (SPM);
- j. melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi;
- k. melaksanakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- l. melaksanakan pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- m. melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- n. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- o. melaksanakan penyelenggaraan publikasi;
- p. melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- q. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan data pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- r. melaksanakan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- s. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- t. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- v. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan dan keuangan.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sub bagian tata usaha;
 - d. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan dinas;
 - e. menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - f. melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
 - g. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - h. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat

perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BIDANG PERUMAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

- (1) Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, sarana prasarana dan utilitas umum pada tingkat kota sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi antara lain :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. pelaksanaan pembangunan gedung-gedung pemerintahan daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugasnya.

- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yaitu :
- a. menyelenggarakan perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - e. menyelenggarakan pembangunan gedung-gedung pemerintahan daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengembangan perumahan rakyat dan bangunan gedung;
 - g. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan bangunan gedung;
 - h. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi;
 - i. menyelenggarakan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
 - j. menyelenggarakan penetapan rencana dan program kerja pelayanan pengembangan perumahan dan bangunan gedung;
 - k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan perumahan dan bangunan gedung;
 - l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - m. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

- o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan membawahi :

A. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan

- (1) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan dan bangunan gedung.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan pendataan dan perencanaan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan pendataan dan perencanaan;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendataan dan perencanaan;
 - d. melaksanakan perencanaan dokumen dan masterplan penataan bangunan perumahan dan gedung serta pengembangan sistem pembiayaan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan perencanaan, pendataan dan pemberdayaan pembangunan perumahan rakyat, sarana, prasarana dan utilitas umum;
 - f. melaksanakan perancangan konsep pembangunan kawasan perumahan dan bangunan gedung;
 - g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - h. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Pemberdayaan, Bantuan dan Pembiayaan

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan, Bantuan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan, Bantuan dan Pembiayaan yaitu :
 - b. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan seksi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan seksi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan;
 - d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan;
 - e. melaksanakan kebijakan bimbingan teknis serta pemantauan pelaksanaan perumahan rakyat dan bangunan gedung;
 - f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan pelaksanaan pembangunan kawasan perumahan dan bangunan gedung;
 - g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan dan bangunan gedung;
 - h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

- i. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan bangunan gedung.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan seksi pemantauan dan evaluasi;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan seksi pemantauan dan evaluasi;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan gedung dan kantor pemerintah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perumahan;
 - f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - g. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

- (1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan permukiman serta penyelenggaraan sektor permukiman meliputi penataan, pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas rumah kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi antara lain :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman yaitu :
 - a. menyelenggarakan perencanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
 - b. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penataan, pendataan dan perencanaan teknik dibidang kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan;
 - e. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan, pencegahan, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, kordinasi dan fasilitasi penataan kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan;

- g. menyelenggarakan evaluasi survey investigasi dan design kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan;
- h. menyelenggarakan kebijakan bimbingan teknis serta pemantauan pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni;
- i. menyelenggarakan persiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan dalam penyusunan perencanaan permukiman;
- j. menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang kawasan permukiman;
- k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- l. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan membawahi :

A. Kepala Seksi Perencanaan

- (1) Kepala Seksi Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang kawasan permukiman.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Perencanaan yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan seksi perencanaan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan seksi perencanaan;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan;

- d. melaksanakan penyusunan perencanaan, pencegahan, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- e. melaksanakan perencanaan dan peningkatan kualitas tempat pemakaman umum (TPU);
- f. melaksanakan rencana kerja dibidang survey, pendataan dan perencanaan penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. melaksanakan persiapan bahan rencana kerja dibidang survey, pendataan dan perencanaan penyehatan lingkungan permukiman;
- h. melaksanakan perencanaan teknik dibidang kawasan permukiman;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Pelaksanaan

- (1) Kepala Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sektor perumahan, rumah kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Pelaksanaan yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan seksi pelaksanaan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan seksi pelaksanaan;

- c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan pembangunan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pembangunan rumah tidak layak huni;
- f. melaksanakan pengembangan kawasan permukiman kumuh;
- g. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pertamanan;
- h. melaksanakan pembangunan dibidang penyehatan lingkungan dan sanitasi;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman serta pembangunan infrastruktur perumahan.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan seksi pemantauan dan evaluasi;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan seksi pemantauan dan evaluasi;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi;

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman serta pembangunan infrastruktur perumahan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah tidak layak huni;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan permukiman kumuh;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana pertamanan;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan dibidang penyehatan lingkungan dan sanitasi;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j. memberikan petunjuk dan dukungan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, maka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk mewujudkan pegawai yang profesional dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu, setiap Pegawai Negeri Sipil harus memiliki rencana dan kerja setiap tahunnya sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun SKP, yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan dengan tugas jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab maupun rincian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Unsur penilaian SKP adalah Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerja Sama, Prakarsa dan Kepemimpinan.

D. KENDALA / PERMASALAHAN

Permasalahan yang masih dihadapi pada masing-masing bidang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya adalah :

1. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Adanya permasalahan lahan untuk kegiatan fisik yang menyangkut kepentingan umum, seperti: jalan setapak, jalan lingkungan dan MCK SLBM;
- b. Minimnya tenaga teknis pada bidang Kawasan Permukiman yang mengakibatkan tingkat pengawasan terhadap pekerjaan juga menjadi minim;
- c. Kurangnya SDM KSM dalam mengelola kegiatan SLBM;
- d. Tidak tersedianya sumber air bersih pada kegiatan sanitasi.

2. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- a. Kurangnya personil untuk perencanaan dan pengawasan pada bidang Perumahan;
- b. Belum tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan kantor pemerintahan;
- c. Kurangnya kesungguhan pihak mitra kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai Time Schedule.

Dan beberapa permasalahan umum lainnya seperti :

1. Faktor cuaca yang kurang mendukung.
2. Rendahnya dukungan/partisipasi masyarakat dilokasi pekerjaan.

E. PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi permasalahan diatas disarankan beberapa solusi pemecahan sebagai berikut :

1. Dilakukannya percepatan penyelesaian Perda Bangunan Gedung;
2. Perlu koordinasi dengan Instansi terkait;
3. Personil teknis mengikuti bimtek dan sosialisasi;
4. Penyusunan aplikasi untuk mengontrol perkembangan bangunan gedung/pemanfaatan ruang lainnya.
5. Khusus untuk kegiatan sanitasi, perlu dilakukan penyusunan jadwal yang benar-benar akurat mulai dari sosialisasi, pemilihan desa, sampai tahap pelaksanaan, sehingga kegiatan tersebut selesai tepat waktu dan tepat guna.
6. Untuk jalan setapak, perlunya adanya dukungan masyarakat seperti surat pernyataan tidak keberatan dan hibah tanah.
7. Perlu penambahan personil untuk perencanaan dan pengawasan.
8. Penyediaan lahan siap Bangun.
9. Perlu penyediaan fasilitas kendaraan dinas operasional.



Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Perencanaan Strategis (strategic planning) merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Bahwa dalam menyusun perencanaan strategis harus mencakup pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan), maka tahap berikutnya yang perlu ditindaklanjuti adalah menetapkan indikator kinerja organisasi.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan sistem akuntabilitas kinerja yang penting adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang dapat berubah setiap saat dimana prinsipnya berorientasi pada pencapaian hasil.

A. VISI DAN MISI

Visi : Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli mengacu pada Visi Walikota Defenitif yaitu :

“ Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”

Misi : Untuk memberhasilkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli telah merumuskan melalui Misi yaitu :
Membangun Infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan yaitu :

- 1. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana kawasan permukiman yang ramah lingkungan.**
- 2. Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah**

3. Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jaringan infrastruktur air bersih, sanitasi lingkungan dan air limbah

B. TUJUAN DAN SASARAN

B. 1. TUJUAN

Secara umum tujuan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli adalah :

1. Menciptakan dan melaksanakan lingkungan yang teratur, nyaman, lancar dan berwawasan lingkungan;
2. Memiliki sumber data perencanaan yang matang dan akurat;
3. Terjalannya proses koordinasi/ kerjasama yang baik;
4. Melaksanakan pembangunan gedung kantor pemerintah yang memberikan fungsi maksimal kepada masyarakat dan Pemerintah Kota;
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang layak huni dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bangunan gedung;
6. Meningkatkan layanan sarana sanitasi lingkungan dan pengolahan air limbah keluarga;

B. 2. SASARAN

1. Tercapainya pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
2. Program dengan skala prioritas dan berkelanjutan sangat dibutuhkan dengan tujuan pembangunan itu dapat dirasakan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat;
6. Terciptanya kawasan permukiman baru yang sehat;
7. Tersedianya prasarana gedung kantor yang memadai;
8. Meningkatkan kinerja personil sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;
9. Sanitasi kota/desa dapat berfungsi dengan baik;

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

C. 1. Kebijakan

1. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan;
2. Penataan Lingkungan Kawasan permukiman yang terpadu dan terintegrasi;
3. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
4. Pengadaan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, taman kota, rumah dinas, kantor pemerintahan, pemakaman umum (TPU) dan pembangunan lainnya untuk kepentingan public dan pemerintah;
5. Penataan kawasan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah;
6. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah;
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan dan air limbah;
8. Peningkatan system pengolahan air limbah perkotaan;

C. 2. Program Strategis

Program Pembangunan untuk mewujudkan misi Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Gunungsitoli sesuai dengan urusan pemerintahan adalah ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
7. Program Pemberdayaan Komunitas perumahan;
8. Program Pengolaan Air Limbah Permukiman;
9. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan sebagai wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	91%
2	Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Daerah	Tersedianya lahan untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	30%
		Tertatanya kawasan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah	30%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah	30%
4	Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan	Tertatanya kawasan kumuh perkotaan	15%
		Tertatanya lingkungan kawasan permukiman	36%
		Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	20%
5	Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan, dan air limbah	36%
		Meningkatnya sistem pengolahan air limbah perkotaan	31%
6	Penataan Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dengan upaya pembangunan lainnya	Rasio Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5%



A. Capaian Kinerja Utama

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 adalah untuk mengetahui apakah program dan kegiatan pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel. 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan TA. 2017

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	97,13
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	100	94,49
3	Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	89.07

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
4	Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan peningkatan pengembangan Perumahan (%)	100	94,87
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (%)	100	96,72
5	Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman (%)	100	75,88
6	Penataan Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dengan upaya pembangunan lainnya	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Rasio pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (%)	100	98,34

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang infrastruktur, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan karena Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dapat tersaji pada tabel berikut.

Tabel. 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD/ Renstra (%)	Realisasi %	Tingkat Kemajuan %
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	91	100	109,89
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	17	16	94,12

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD/ Renstra (%)	Realisasi %	Tingkat Kemajuan %
3	Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75	40	53,33
4	Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan peningkatan pengembangan Perumahan (%)	10	11	110,00
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (%)	10	15	150,00
5	Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman (%)	22	25	113,64
6	Penataan Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dengan upaya pembangunan lainnya	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Rasio pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (%)	5	5	100,00

3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di bawah ini :

Tabel. 3.4

Alokasi Sasaran Pembangunan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	%
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	900.130.000	3,21
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	13.933.791.060	49,76
3	Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000	0,36
4	Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan peningkatan pengembangan Perumahan (%)	5.555.861.380	19,84

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	%
	Permukiman yang ramah lingkungan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (%)	700.000.000	2,50
5	Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman (%)	5.563.852.192	19,87
6	Penataan Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dengan upaya pembangunan lainnya	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Rasio pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (%)	1.250.000.000	4,46
Jumlah				28.003.634.632	

Tabel. 3.5
 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	91	100	900.130.000	874.312.458
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	17	16	13.933.791.060	13.166.526.492
3	Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75	40	100.000.000	89.068.725
4	Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan peningkatan pengembangan Perumahan (%)	10	11	5.555.861.380	5.270.926.980
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (%)	10	15	700.000.000	677.049.000
5	Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman (%)	22	25	5.563.852.192	4.222.020.841

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
6	Penataan Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dengan upaya pembangunan lainnya	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Rasio pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (%)	5	5	1.250.000.000	1.229.265.444
Jumlah						28.003.634.632	25.529.169.940

Tabel. 3.6

Program dan Kegiatan beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Anggaran	% Fisik
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	900.130.000	874.312.458	97,13	99,45
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	13.933.791.060	13.166.526.492	94,49	96,92
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	89.068.725	89,07	100,00
4	Program Pengembangan Perumahan	5.555.861.380	5.270.926.980	94,87	94,87
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	700.000.000	677.049.000	96,72	100,00
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.563.852.192	4.222.020.841	75,88	75,88
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	1.250.000.000	1.229.265.444	98,34	100,00
Total		28.003.634.632	25.529.169.940	91,16	

Uraian dari pencapaian program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun anggaran dengan capaian kinerja program 99,45 % dan realisasi keuangannya 97,13 %. Keberhasilan ini dikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Penyediaan sarana dan prasana aparatur telah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun anggaran termasuk penyediaan sarana perkantoran pemerintah telah dimulai pembangunan sebanyak 8 unit dimana 3 unit telah selesai dibangun dan 5 unit dengan kondisi dalam tahap pengerjaan sehingga capaian kinerja program 96,92 % dan realisasi keuangannya 94,49%. Keberhasilan ini disesuaikan dengan kebutuhan aparatur dan kondisi yang ada.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun anggaran dengan capaian kinerja program 100 % dan realisasi keuangannya 89,07 %. Keberhasilan ini dikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

4. Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 60 unit yaitu di kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak 25 Unit dan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebanyak 35 unit pelaksanaannya dengan swakelola. Pembangunan Jalan lingkungan atau jalan setapak sebanyak 30 Paket dengan panjang 4.325 meter, telah terlaksana dengan realisasi fisik mencapai 94,87% dan realisasi keuangan pencapaian 94,87. Dari 60 unit pembangunan RLH ada 1 unit batal dikerjakan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dikarenakan masalah pertapakan rumah dan 5 unit di Kecamatan Gunungsitoli Selatan tidak tuntas karena keterlambatan pengajuan penarikan anggaran oleh KSM pelaksana dan begitu juga pembangunan jalan lingkungan 1 paket pekerjaan yang batal dikerjakan karena terkait dengan masalah pembebasan lahan. Secara keseluruhan pembangunan RLH dan Jalan lingkungan terlaksana dengan baik dikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan sebanyak 1 Kawasan dengan realisaasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 96,72 %, terlaksana dengan baik dikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pembangunan Toilet Umum sebanyak 8 Unit, Air bersih 2 unit dan Pembangunan MCK+ Ipal Komunal sebanyak 3 Unit, serta Tangki Septic Komunal sebanyak 17 paket namun dari 17 paket Tangki Septic Komunal 6 paket batal tidak tersedia anggaran sumber dana alokasi khusus akibat melewati batas waktu penyampaian laporan pengikatan kontrak yang telah diatur dalam permenkeu, secara umum kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, dengan realisasi fisik 75,88 % dan keuangan 75,88 %, hal ini disebabkan oleh lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengadaan dan pemasangan lampu hias ditaman yaahowu dan Pengadaan Truck Skylift Walker (Tangga Mobile) sebanyak 1 unit dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan 98,34 %. Secara keseluruhan kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan adalah suatu pertanggungjawaban dari status instansi pemerintah yang mencerminkan kewajiban untuk memeberikan laporan pertanggungjawaban dan juga mencerminkan kewajiban untuk menjawab hal-hal yang memerlukan jawaban.

Bahwa didalam pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya, operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), DBH Provinsi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembiayaan dari APBD Kota Gunungsitoli TA. 2017 yang dirinci sebagai beriku :

Tabel 3.1.
Daftar Kegiatan Yang Dikelola Dinas PERKIM Kota Gunungsitoli bersumber dari Dana APBD dan P.APD Tahun Anggaran 2017

	KEGIATAN	REALISASI FISIK (%)	PAGU ANGGARAN	NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		KET.	
					Rp.	%		
	1	2	3	4	5	6	7	
SEKRETARIAT								
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
	1	Penyediaan jasa surat menyurat (DAU - 2017)	100,00	5.000.000	-	4.999.650	99,99	DAU
	2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU - 2017 = Rp. 60.000.000 + SILPA Umum 2016 = Rp. 15.000.000)	90,59	75.000.000	-	67.939.476	90,59	DAU + SILPA Umum
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (DAU - 2017)	100,00	5.000.000	-	1.828.600	36,57	DAU
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAU - 2017)	100,00	20.400.000	-	20.400.000	100,00	DAU
	5	Penyediaan alat tulis kantor (DAU - 2017 = Rp. 20.000.000 + SILPA Umum 2016 Rp. 10.690.000)	100,00	30.690.000	-	30.690.000	100,00	DAU + SILPA Umum
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (DAU - 2017)	100,00	13.850.000	-	12.600.000	90,97	DAU
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (DAU - 2017)	100,00	3.000.000	-	3.000.000	100,00	DAU
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (DAU - 2017 = Rp. 5.000.000 + SILPA Umum	100,00	20.000.000	-	19.345.000	96,73	DAU + SILPA Umum
	9	Penyediaan makanan dan minuman (DAU - 2017 = Rp.	100,00	50.000.000	-	49.220.000	98,44	DAU + SILPA Umum
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (DAU - 2017 = Rp 100.000.000 + SILPA Umum 2016	100,00	175.000.000	-	172.744.732	98,71	DAU + SILPA Umum
	11	Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (DAU - 2017 = Rp. 33.750.000 + SILPA Umum 2016 = 10.000.000)	100,00	43.750.000	-	43.750.000	100,00	DAU + SILPA Umum
	12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum (DAU - 2017 = Rp.	100,00	172.260.000	-	171.985.000	99,84	DAU + SILPA Umum
	13	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor (DAU - 2017)	100,00	81.600.000	-	79.900.000	97,92	DAU
	14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (DAU - 2017)	100,00	20.400.000	-	20.400.000	100,00	DAU
	15	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat berat (DAU - 2017)	100,00	22.800.000	-	20.900.000	91,67	DAU
	16	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (DAU - 2017)	100,00	2.500.000	-	2.500.000	100,00	DAU
	17	Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 (DAU - 2017 = Rp. 140.250.000 + SILPA Umum 2016 = Rp. 18.630.000)	100,00	158.880.000	-	152.110.000	95,74	DAU + SILPA Umum
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (DAU - 2017 = Rp. 35.000.000 + SILPA Umum 2016 =	100,00	49.400.000	-	47.946.579	97,06	DAU + SILPA Umum
	2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor (DAU - 2017)	100,00	10.000.000	-	8.450.000	84,50	DAU
	3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAU - 2017 = Rp. 20.000.000 + SILPA Umum 2016 = Rp.	100,00	36.500.000	-	36.500.000	100,00	DAU
	4	Sewa gedung kantor (DAU - 2017)	100,00	60.000.000	-	60.000.000	100,00	DAU
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							
	1	Mengikuti diklat bimtek/Workshop/kursus/ sosialisasi dalam dan luar daerah (DAU - 2017)	100,00	100.000.000	-	89.068.725	89,07	DAU
Jumlah Total Bagian Sekretariat...		99,57	1.156.030.000	-	1.116.277.762	96,56		
BIDANG PERUMAHAN, PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM								
I.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
A.	Pembangunan Gedung :							
	APBD		100,00	9.121.100.000	8.581.850.000	8.889.577.413	97,46	DAU + SILPA
	1	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli (DAU-2017)	100,00	1.000.000.000	937.017.000	983.925.500	98,39	DAU
	2	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli (DAU-2017)	100,00	1.000.000.000	944.251.000	993.830.700	99,38	DAU
	3	Pembangunan Balai Benih Dinas Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli (DAU-2017)	100,00	1.000.000.000	928.333.000	969.258.000	96,93	DAU
	4	Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli di Desa Dahana Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pekerjaan TA. 2016 (DAU-2017)	100,00	600.000.000	558.358.000	585.383.000	97,56	DAU
	5	Pembangunan Workshop Dinas TRPK di Kec. Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan Pekerjaan TA. 2016 (DAU-2017)	100,00	1.500.000.000	1.406.918.000	1.469.359.113	97,96	DAU
	P.APD							
	6	Penataan Interior Gedung Kantor Walikota Gunungsitoli (SILPA Umum 2016 = Rp. 474.194.733 + SILPA Prasarana Pemerintah Daerah 2010-2011 = Rp. 25.805.267)	100,00	500.000.000	480.456.000	492.878.800	98,58	SILPA Umum + SILPA Prasarana Pemerintah Daerah
	7	Pemasangan Lampu Jalan di Pasar Luaha dhi. Lampu Jalan Ex. Jalan Pendidikan (DAU - 2017)	100,00	50.000.000	47.250.000	49.150.000	98,30	DAU
	8	Pengecoran Kolom Beton Pada bangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Desa Saewe Kec. Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	100.000.000	94.645.000	98.545.000	98,55	DAU
	9	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli dhi. SDLB Desa Dahana Kec. Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	700.000.000	658.734.000	675.609.000	96,52	DAU
	10	Pembangunan Gedung Kantor Satpol-PP (SILPA Umum 2016)	100,00	200.000.000	189.445.000	195.995.000	98,00	SILPA Umum
	11	Pembangunan Gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R di TPA Hela Kec. Gunungsitoli Utara (SILPA DAK Lingkungan Hidup 2010 & 2014)	100,00	100.000.000	94.650.000	98.150.000	98,15	SILPA DAK Lingkungan Hidup
	12	Pembangunan Kantor Camat Gunungsitoli Selatan (DAU - 2017)	100,00	1.200.000.000	1.160.191.000	1.177.366.000	98,11	DAU
	13	Pembangunan Rumah Dinas Polsek Alooa dhi. Komplek Polsek Alooa Kecamatan Gunungsitoli Alooa (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	142.110.000	147.085.000	98,06	SILPA Umum
	14	Pembangunan Paviliun Kota Gunungsitoli di Lokasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Medan (DAU - 2017)	100,00	1.000.000.000	939.492.000	934.572.300	93,46	DAU

	KEGIATAN	REALISASI FISIK (%)	PAGU ANGGARAN	NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		KET.
					Rp.	%	
	1	2	3	4	5	6	7
15	Investigasi daya dukung tanah (Sondir) pada pembangunan balai benih dinas pertanian gunungsitoli utara (SILPA Umum 2016)	100,00	21.100.000	-	18.470.000	87,54	SILPA Umum
B	Pembangunan Pagar Kantor	100,00	1.320.000.000	1.240.782.000	1.290.872.000	97,79	DAU + SILPA
	APBD						
1	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Gunungsitoli Barat (DAU - 2017)	100,00	500.000.000	464.072.000,00	485.172.000	97,03	DAU
	P. APBD						
2	Pembangunan Pagar Pasar Beringin Kelurahan Pasar Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	120.000.000	113.750.000,00	119.750.000	99,79	DAU
3	Pembangunan Pagar Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	200.000.000	189.455.000,00	196.480.000	98,24	DAU
4	Pembangunan Pagar Kantor Walikota Gunungsitoli (DAU 2017)	100,00	100.000.000	94.615.000,00	99.615.000	99,62	DAU
5	Pembangunan Pagar Dinas Pariwisata dan Pagar Pasar Gomo Kel. Pasar Kecamatan Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	200.000.000	189.425.000,00	196.725.000	98,36	DAU
6	Pembangunan Pagar Bangunan Pemerintah di Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan (SILPA Umum 2016)	100,00	200.000.000	189.465.000,00	193.130.000	96,57	SILPA Umum
C	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor	90,91	1.911.791.060	1.814.166.000	1.868.977.000	97,76	DAU + SILPA
	APBD						
1	Rehab Gedung Kantor Yang Dipinjam Pakai Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli (DAU-2017)	-	5.068.300		5.048.300	99,61	DAU
2	Renovasi Gedung Kantor Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli (DAU-2017)	100,00	100.000.000	94.750.000,00	99.150.000	99,15	DAU
3	Renovasi Gedung Serbaguna dan Rumah Dinas Camat Gunungsitoli Utara (DAU-2017)	100,00	100.000.000	94.795.000,00	99.645.000	99,65	DAU
	P. APBD						
4	Rehab Gedung Kantor Yang Dipinjam Pakai Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	147.135.000,00	148.360.000	98,91	SILPA Umum
5	Renovasi Gedung Landcadika (Pramuka) di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	500.000.000	481.437.000,00	486.434.500	97,29	DAU
6	Rehabilitasi Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	150.000.000	142.135.000,00	146.485.200	97,66	DAU
7	Renovasi Kantor Pemerintahan Kota Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	200.000.000	189.475.000,00	193.540.000	96,77	DAU
8	Rehabilitasi Aula Kodim 0213/NIAS (DAU - 2017)	100,00	100.000.000	94.685.000,00	97.885.000	97,89	DAU
9	Renovasi Gedung Serbaguna dan penataan halaman Kantor Camat Gunungsitoli Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa (SILPA Umum 2016)	100,00	156.722.760	149.225.000,00	154.825.000	98,79	SILPA Umum
10	Pembangunan Tambahan Ruang Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa di Kec. Gunungsitoli Idanoi (DAU - 2017)	100,00	250.000.000	231.054.000,00	241.054.000	96,42	DAU
11	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah di Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan (DAU - 2017)	100,00	200.000.000	189.475.000,00	196.550.000	98,28	DAU
D	Perencanaan Pembangunan	87,50	1.330.000.000	885.475.000	906.029.700	68,12	DAU + SILPA
	P. APBD						
1	Perencanaan Konsultan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (SILPA Umum 2016)	100,00	45.000.000	44.654.000	44.654.000	99,23	SILPA Umum
2	Perencanaan Konsultan Kantor Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	45.000.000	44.559.000	44.559.000	99,02	SILPA Umum
3	Perencanaan Pembangunan Kantor Pemerintahan Kota Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	300.000.000	283.857.000	289.557.000	96,52	DAU
4	Perencanaan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli (DAU - 2017)	-	400.000.000	-	-	-	DAU
5	Perencanaan Paviliun Kota Gunungsitoli di lokasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Medan (SILPA Umum 2016)	100,00	45.000.000	43.400.000	44.570.000	99,04	SILPA Umum
6	Pengawasan Paviliun Kota Gunungsitoli di lokasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Medan (SILPA Umum 2016)	100,00	50.000.000	49.355.000	49.355.000	98,71	SILPA Umum
7	Penyusunan DED dan RAB Pembangunan Museum Gempa (SILPA Umum 2016)	100,00	45.000.000	42.350.000	44.400.000	98,67	SILPA Umum
8	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap Kawasan Pembangunan Gedung Perkantoran Terintegrasi Pemerintahan Kota Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	400.000.000	377.300.000	388.934.700	97,23	SILPA Umum
E	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung	100,00	60.000.000	-	38.773.800	64,62	SILPA Umum
	P. APBD						
1	Sosialisasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung (SILPA Umum 2016)	100,00	60.000.000		38.773.800	64,62	SILPA Umum
F	Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Gunungsitoli	100,00	35.000.000	-	19.400.000	55,43	SILPA Umum
	P. APBD						
1	Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	35.000.000		19.400.000	55,43	SILPA Umum
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
A.	Pembangunan Rumah Layak Huni	94,00	1.800.000.000	1.710.000.000	1.611.348.100	89,52	DAU
	APBD						
1	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (DAU-2017)	100,00	13.350.000	-	13.350.000	100,00	DAU
2	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Selatan (DAU-2017)	100,00	10.800.000	-	10.800.000	100,00	DAU
	P. APBD						
3	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dhi. Desa Hilimbawodesolo, Desa Simanaere, Desa Dahana, Desa Bawodesolo dan Desa Tubeneo I (DAU-2017)	100,00	256.500.000	256.500.000	256.500.000	100,00	DAU
4	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dhi. Desa Lewuoguru Idanoi, Desa Fadoro, Desa Awa'ai, Desa ombolata dan Desa sifalaete (DAU-2017)	100,00	228.000.000	228.000.000	228.000.000	100,00	DAU

KEGIATAN	REALISASI FISIK (%)	PAGU ANGGARAN	NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		KET.	
				Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
5	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dhi. Desa Siwalubanua II, Desa Tetehosi II, Desa Humene, Desa Lolona'a Idanoi dan Desa Hiluwato Idanoi. (DAU-2017)	100,00	228.000.000	228.000.000	228.000.000	100,00	DAU
6	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dhi. Desa Siwalubanua I, Desa Tetehosi I, Desa Siwalubanua I, Desa Binaka dan Desa Idanofae dan Desa Fowa. (DAU-2017)	70,00	285.000.000	285.000.000	199.500.000	70,00	DAU
7	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dhi. Desa Ononomolo I Lot, Desa Fodo I, Desa Faekhu, Desa Luaha Laraga dan Desa Lolofaso Tabaloho. (DAU-2017)	100,00	171.000.000	171.000.000	171.000.000	100,00	DAU
8	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dhi. Desa Sihare'o Tabaloho, Desa Lolomboli, Desa Mazingo Tabaloho, Desa Ombolata Simanaere dan Desa Onozitoli Tabaloho(DAU-2017)	100,00	228.000.000	228.000.000	228.000.000	100,00	DAU
9	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dhi. Desa hiligodu Ombolata, Desa Lololakha, Desa Tetehosi Ombolata, Desa Hiligara dan Desa Sisobahile Tanase'o(DAU-2017)	70,00	313.500.000	313.500.000	219.450.000	70,00	DAU
10	Biaya Penunjang Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	100,00	65.850.000	-	56.748.100	86,18	DAU
B	Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli	100,00	40.000.000	-	31.400.000	78,50	PAD
	APBD						
1	Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pendataan TA. 2016 (PAD)	100,00	40.000.000		31.400.000	78,50	PAD
C	Pembangunan Infrastruktur Perumahan	100,00	325.000.000	308.130.000	322.330.000	99,18	DAU
	APBD						
1	Pembangunan rabat beton dan parit beton di lokasi Perumahan BRR Blok A Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli. (DAU-2017)	100,00	125.000.000	118.675.000	124.075.000	99,26	DAU
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Idaman Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli. (DAU-2017)	100,00	100.000.000	94.800.000	99.200.000	99,20	DAU
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Muhammadiyah Lorong I Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli. (DAU-2017)	100,00	100.000.000	94.655.000	99.055.000	99,06	DAU
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN						
A.	A.Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan di kec. Gunungsitoli Utara	100,00	700.000.000	651.399.000	677.049.000	96,72	DAU
	APBD						
1	Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan di kec. Gunungsitoli Utara. (DAU-2017)	100,00	700.000.000	651.399.000	677.049.000	96,72	DAU
Jumlah Total Bidang Perumahan...		97,24	16.642.891.060	15.191.802.000	15.655.757.013	94,07	
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN							
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
A.	Pembangunan Infrastruktur Perumahan	96,30	3.240.861.380	3.019.500.000	3.157.298.880	97,42	DAU+SILPA DAK+SILPA Umum+DBH Propinsi
	P.APBD						
1	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dari Dusun IV Delafiga - Dusun VII Ombolata Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli (DAU - 2017 = Rp. 150.817.273 + SILPA DAK Prasarana Perumahan dan Permukiman 2015 = Rp. 49.182.727)	100,00	200.000.000	189.500.000	197.825.000	98,91	DAU+SILPA DAK Prasarana Perumahan dan Permukiman 2015
2	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun II Desa Lasara Bahili (Dekat Lapangan Voli) dhi. Rumah Ama Yunius Kec. Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.250.000	99,25	SILPA Umum 2016
3	Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Dolok Martimbang Gang Fahasaradodo Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	141.700.000	148.750.000	99,17	SILPA Umum 2016
4	Pembangunan Jln. Lingkungan dhi. Dimulai dari Jalan Umum menuju Dusun I Desa Onozitoli Kec. Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.550.000	99,03	DAU
5	Pembangunan Jalan Lingkungan dari Jalan Diponegoro Nomor 362 Menuju JP. Valon III Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	75.000.000	70.850.000	74.450.000	99,27	SILPA Umum 2016
6	Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Gapura Lingkungan III Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli (DBH Propinsi)	100,00	75.000.000	70.650.000	74.250.000	99,00	DBH Propinsi
7	Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Asrama Anas Lingkungan VI Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli (DBH Propinsi)	100,00	100.000.000	94.250.000	94.537.500	94,54	DBH Propinsi
8	Pembangunan Jalan Lingkungan di Gg. Masjid dhi. Mulai dari samping rumah aswar Lase menuju Tanah Wakaf Habib Sulaiman Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli (DBH Propinsi)	100,00	125.000.000	118.000.000	123.900.000	99,12	DBH Propinsi
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju TPU Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunungsitoli (DBH Propinsi)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.550.000	99,03	DBH Propinsi
10	Pembangunan Jalan Lingkungan dari Rumah Ama Caca menuju lapangan voli Desa Tuhemberua Ulu Dusun II Kec. Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.775.000	99,18	SILPA Umum 2016
11	Pembangunan jalan lingkungan dan parit dari jalan Golkar dhi. Dimulai dari samping STTN menuju Laverna Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli (DBH Propinsi)	100,00	125.000.000	118.000.000	124.050.000	99,24	DBH Propinsi
12	Pembangunan Jalan Lingkungan dimulai dari pertapakan surau menuju pantai miga Kecamatan Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	100.000.000	94.250.000	98.925.000	98,93	SILPA Umum 2016
13	Pembangunan Jalan Lingkungan Komplek Jalan AMD Gg. Samping rumah Ama Hasrat Harefa menuju samping rumah Ama Ani Halawa Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli (DBH Propinsi)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.250.000	99,25	DBH Propinsi
14	Pembangunan jalan lingkungan di Gg. Rambutan dhi. Dimulai dari samping rumah Safrida Bugis menuju rumah Hasfardin Zai Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli (DBH Propinsi)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.250.000	99,25	DBH Propinsi

	KEGIATAN	REALISASI FISIK (%)	PAGU ANGGARAN	NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		KET.
					Rp.	%	
	1	2	3	4	5	6	7
15	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Panti Asuhan Yayasan Karya Faomasi Zoaya Kompleks Laverna Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	-	50.000.000	47.350.000	950.000	1,90	Lokasi Bermasalah
16	Pembangunan Jalan Setapak dari Jalan Lauru - Rumah Ama Gameni Harefa Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.750.000	99,17	DAU-2017
17	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pendukung Dusun II Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.725.000	99,15	SILPA Umum 2016
18	Pembangunan Jalan Lingkungan di Komplek Mega Hill Dusun I Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.250.000	99,25	DAU-2017
19	Pembangunan Jalan Lingkungan JP. Valon Gang I dan Gang II Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli (DAU - 2017)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.250.000	99,25	DAU-2017
20	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Saudara Dusun II Desa Hilimbawadesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi (Dana Tidak sempat bayar TA. 2016) (SILPA Umum 2016)	100,00	40.861.380	-	40.861.380	100,00	SILPA Umum 2016
21	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun III Desa Awaai Kec. Gunungsitoli Idanoi (DBH Provinsi)	100,00	150.000.000	141.650.000	149.075.000	99,38	DBH Propinsi
22	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Saudara Dusun II Desa Hilimbawadesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi (Lanjutan Kegiatan TA. 2016) (DBH Provinsi)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.400.000	98,93	DBH Propinsi
23	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Simanaere menuju Desa Humene dhi. Samping SMP Negeri 1 Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	141.500.000	147.900.000	98,60	SILPA Umum 2016
24	Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Baluse Komplek Perumnas Fodo Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan (DAU - 2017)	100,00	100.000.000	94.250.000	98.725.000	98,73	DAU-2017
25	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Ononomolo 1 Lot Gunungsitoli Selatan menuju Lasara dhi. Dimulai dari depan rumah Ama Hasan Zebua Kec. Gunungsitoli Selatan (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.450.000	98,97	SILPA Umum 2016
26	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Gereja GPI di Dusun III Desa Onozitoli Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan (DAU - 2017)	100,00	150.000.000	141.500.000	147.875.000	98,58	DAU-2017
27	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kompleks Balai Desa Iraonolase Kec. Gunungsitoli Alooa (SILPA Umum 2016)	100,00	100.000.000	94.300.000	98.775.000	98,78	SILPA Umum 2016
	B. Rehabilitasi Infrastruktur Perumahan P.APBD	100,00	150.000.000	141.500.000	148.550.000	99,03	SILPA Umum
1	Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Bangunan Pendukung di Gg. Oragua Dusun III Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli (SILPA Umum 2016)	100,00	150.000.000	141.500.000	148.550.000	99,03	SILPA Umum 2016
	II. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN						
	A. Pembangunan Prasarana Sanitasi	72,50	5.126.852.192	4.079.450.000	3.818.212.200	74,47	DAK Penugasan - 2017 + SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
	APBD						
1	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	100,00	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
2	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	100,00	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
3	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	100,00	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
4	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Sisarahiligamo Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	100,00	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
5	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara (DAK Penugasan - 2017)	100,00	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
6	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di STT BNKP Sunderman Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	100,00	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
7	Pembangunan IPAL Komunal di Desa Oloro Kec. Gunungsitoli Utara (DAK Penugasan - 2017)	100,00	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
8	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kecamatan Gunungsitoli Selatan (DAK Penugasan - 2017)	100,00	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
9	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kecamatan Gunungsitoli Barat (DAK Penugasan - 2017)	40,00	500.000.000	500.000.000	200.000.000	40,00	DAK Penugasan 2017
10	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (DAK Penugasan - 2017)	100,00	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	DAK Penugasan 2017
	P.APBD						
11	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Moawo Kecamatan Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	-	150.000.000	-	-	-	BATAL
12	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Lingkungan II dan Lingkungan III Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	-	160.000.000	-	-	-	BATAL
13	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Dusun I Desa Sisarahiligamo Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan - 2017)	-	150.000.000	-	-	-	BATAL
14	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara (DAK Penugasan - 2017)	-	159.000.000	-	-	-	BATAL
15	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Dusun II dan Dusun III Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara (DAK Penugasan - 2017)	-	231.000.000	-	-	-	BATAL

KEGIATAN	REALISASI FISIK (%)	PAGU ANGGARAN	NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		KET.	
				Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
16	Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Sihare'o Siwahili Kecamatan Gunungsitoli Barat (DAK Penugasan - 2017)	-	150.000.000	-	-	BATAL	
17	Pembangunan Toilet Umum di Makam Pahlawan Desa Mudik Kec. Gunungsitoli (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.100.000	99,10	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
18	Pembangunan Toilet Umum di Museum Pusaka Nias Kec. Gunungsitoli (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.250.000	99,25	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
19	Pembangunan Toilet Umum di samping Gereja BNKP Fadoro Desa Fadoro Lasara Kec. Gunungsitoli (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.225.000	99,23	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
20	Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja St. Andreas Daso Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	100.000.000	94.250.000	99.225.000	99,23	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
21	Pembangunan Toilet Umum di Gereja GNKPI Jemaat Dahana Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	100.000.000	94.200.000	99.150.000	99,15	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
22	Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja St Gabriel Madula Desa Fadoro You Kecamatan Gunungsitoli Alooa (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	126.852.192	119.750.000	124.862.200	98,43	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
23	Pembangunan Toilet Umum di Gereja Santo Elias Hilimanaze Desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	100.000.000	94.250.000	98.700.000	98,70	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
24	Pembangunan Toilet Umum di SD Dahana Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014)	100,00	100.000.000	94.250.000	98.700.000	98,70	SILPA DAK Infrastruktur Sanitasi 2010,2011,2013 & 2014
B.	Biaya Pengawasan dan Pengendalian	100,00	202.000.000	-	171.038.641	84,67	DAK Penugasan
	APBD						
1	Biaya Pengawasan dan Pengendalian	100,00	202.000.000		171.038.641	84,67	DAK Penugasan 2017
C.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih terutama bagi Masyarakat Miskin	100,00	165.000.000	156.500.000	163.125.000	98,86	DBH CHT
	APBD						
1	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih terutama bagi Masyarakat Miskin (DBH CHT)	100,00	165.000.000	156.500.000	163.125.000	98,86	DBH CHT
D.	Penyediaan Sarana Air Bersih di Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	100,00	70.000.000	66.245.000	69.645.000	99,49	DAU
	APBD						
1	Penyediaan Sarana Air Bersih di Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (DAU - 2017)	100,00	70.000.000	66.245.000	69.645.000	99,49	DAU - 2017
III.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						
1	Pengadaan Truck Skylift Walker (Tangga Mobile) (DAU - 2017)	100,00	750.000.000	703.963.873	736.126.673	98,15	DAU
2	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Kec. Gunungsitoli (PAD)	100,00	500.000.000	470.296.000	493.138.771	98,63	PAD
Jumlah Total Bidang Kawasan Permukiman		96,10	10.204.713.572	8.637.454.873	8.757.135.165	85,81	
Jumlah Total Dinas PERKIM		97,64	28.003.634.632	23.829.256.873	25.529.169.940	91,16	

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017**

DINAS : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Sasaran Strategis Sesuai RENSTRA/ RPJMD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Jumlah Anggaran		Persentase Capaian (%)		Ket.
						Anggaran	Realisasi	Kinerja	Anggaran	
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	91,00	100	900.130.000	874.312.458	109,89	97,13	
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	17,00	16	13.933.791.060	13.166.526.492	94,12	94,49	
3	Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75,00	40	100.000.000	89.068.725	53,33	89,07	

DINAS : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Sasaran Strategis Sesuai RENSTRA/ RPJMD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Jumlah Anggaran		Persentase Capaian (%)		Ket.
						Anggaran	Realisasi	Kinerja	Anggaran	
4	Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan peningkatan pengembangan Perumahan (%)	10,00	11	5.555.861.380	5.270.926.980	110,00	94,87	
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (%)	10,00	15	700.000.000	677.049.000	150,00	96,72	
5	Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman (%)	22,00	25	5.563.852.192	4.222.020.841	113,64	75,88	

DINAS : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Sasaran Strategis Sesuai RENSTRA/ RPJMD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Jumlah Anggaran		Persentase Capaian (%)		Ket.
						Anggaran	Realisasi	Kinerja	Anggaran	
6	Penataan Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dengan upaya pembangunan lainnya	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Rasio pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (%)	5,00	5	1.250.000.000	1.229.265.444	100,00	98,34	
Jumlah						28.003.634.632	25.529.169.940		91,16	

Gunungsitoli, 25 Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI,



WIRNI ZEBUA, ST, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19650524 199703 2 002



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli Tahun 2017 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun Rumah Layak Huni dan Pembangunan/memelihara jalan lingkungan maupun sarana Sanitasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan
2. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan

3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan lingkungan dan Sanitasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama)

4.2 Solusi

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendukung dana pembangunan di Kota Gunungsitoli, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan Propinsi, maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana agar lebih profesional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Gunungsitoli, 25 Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI,



WIRNI ZEBUA, ST, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19650524 199703 2 002